

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan menggelincirnya era Reformasi, maka mulai bermunculan partai-partai, mulai dari partai kecil hingga besar. Mereka mengambil kesempatan untuk menjadikan aktivis-aktivisnya sebagai wakil rakyat. Hal ini jelas berkaitan dengan kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya ada keterkaitannya dengan Trias Politika. Trias politika ini menganggap bahwa kekuasaan Negara terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan Legislatif (*Rulemaking Function* / berkuasa untuk membuat Undang-undang), kekuasaan Eksekutif (*Application Function* / berkuasa untuk melaksanakan Undang-undang), dan kekuasaan Yudikatif (*Adjudication Function* / berkuasa untuk mengadili atas orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang).

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar Ilmu Politik, Trias Politika merupakan suatu prinsip yang bersifat Normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa tersebut. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga Negara lebih terjamin.” (Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik : 281-282). Salah satu filsuf inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises On Civil Government* (1690) yang ditulis Locke sebagai bentuk kritik atas kekuasaan yang absolute dari raja-raja Stuart, dan untuk mengiyakan *The Glorious Revolution of 1688* atau Revolusi Gemilang yang sudah dimenangkan parlemen Inggris.

Politik sendiri memiliki artian usaha menggapai taraf hidup yang lebih baik. Orang Yunani kuno (Plato dan Aristoteles) menamakannya *en dam onia* atau *the good life*. Mengapa politik dalam hal ini menjadi sangat penting? Dahulu, masyarakat mengalami keterbatasan sumber alam dan perlu mencari salah satu cara untuk pendistribusian sumber daya alam agar semua masyarakat

mendapatkannya. Hal inilah politik. Era saat ini, definisi politik lebih menekankan pada usaha untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi atau distribusi, dan lain-lain.

Salah satu agenda politik adalah Pemilihan Umum. Masyarakat mengenalnya sebagai proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan Umum adalah salah satu upaya untuk menentukan posisi pemimpin di setiap negara, daerah, bagian, ataupun wilayah. Dengan adanya sosok pemimpin, kehidupan bermasyarakat akan terstruktur lebih baik untuk jangka waktu singkat ataupun panjang. Negara dipimpin oleh seorang Presiden, provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, Kota dipimpin seorang Walikota, Kabupaten dipimpin seorang Bupati, dan lain-lain. Dalam pemilu, para peserta pemilu (calon) menawarkan janji-janji dan program-programnya pada Konstituen pada saat masa kampanye berlangsung. Masa kampanye pun telah ditentukan pada saat menjelang hari pemungutan suara. Sistem pemenangan telah diatur dan ditetapkan, serta para peserta menyetujuinya dan disosialisasikan ke para Konstituen (pemilih). Sejarah pemilihan umum di Indonesia, pertama kali diadakan pemilu yaitu pada tahun 1955 saat Indonesia berumur 10 tahun. Pemilu diadakan dua kali terhitung pada tanggal 29 september 1955 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota Konstituante. (dipetik dari situs KPU).

Berakhirnya era Orde Baru (1998) membuat banyak perubahan pada *Check and Balance* di Indonesia. Salah satu dari bentuk perubahan tersebut ialah penataan kembali fungsi dan peran lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dasar hukum perubahan itu ialah empat Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Inilah yang menjadi dasar hukum untuk pengembalian fungsi pembagian Trias Politika dan pelaksanaan *Check and Balance* tersebut. Sesuatu yang kita lakukan, pasti memiliki sisi plus dan minusnya. Begitu pula yang terjadi dalam penataan fungsi dan peran ini mengakibatkan terjadinya *Legislative-Heavy*.

Akhir tahun 2017, Khofifah Indar Parawansa (yang ditunjuk presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial ke-27 pada Kabinet Kerja periode 2014-2019)

diberitakan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Perempuan yang sekaligus menjadi menteri pemberdayaan perempuan ini menggandeng pasangannya untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang, Emil Elistianto Dardak. Selain aktif di dunia politik, perempuan alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini dikenal masyarakat sebagai ketua umum Muslimat NU ini viral menjadi sorotan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pemilihan Gubernur akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2023. Pemilihan ini akan dilaksanakan secara langsung dengan sistem pencoblosan.

Berita pencalonan Khofifah dimuat di berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun newmedia. Dalam harian surat kabar Jawa Pos, Kompas, beberapa surat kabar lainnya, dan juga Online, diwacanakan bahwa Khofifah diusung oleh lima partai besar yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, dan partai Nasdem. Disini peneliti ingin menganalisis bagaimana Surat Kabar Harian Jawa Pos dan Kompas membingkai hal tersebut. Jawa pos dan Kompas adalah dua media cetak yang berbeda yang jelas memiliki pandangan yang berbeda pula. Media cetak adalah sebagai media komunikasi bagaimana pemberitaan tersebut bisa masuk ke telinga masyarakat. John Fiske menjelaskan dua mazhab utama dalam studi komunikasi. Pertama, Mazhab Proses yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, dan kedua Mazhab Semiotika, yaitu melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (John Fiske : 2004).

Jawa Pos adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Jawa Pos sendiri sirkulasinya telah tersebar di penjuru Jawa Timur, Bali, dan sebagian DIY dan Jawa Tengah. Jawa Pos mengklaim sebagai "SKH Nasional yang Terbit dari Surabaya". Sedangkan Kompas adalah surat kabar harian yang berskala Nasional yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 28 Juni tahun 1965 sebanyak empat halaman dengan oplah 6.800 eksemplar. Kompas bisa disebut sebagai surat kabar yang matang dalam hal manajemen organisasi dan redaksinya. Kompas juga hadir dalam lembaran daerah atau Kompas lokal untuk lebih mendekatkan diri dengan

khalayak yang berada di daerah lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kompas saat ini juga dapat diakses melalui internet yang beralamatkan www.kompas.com yang menyediakan berita-berita sama dengan yang terdapat pada koran Kompas dalam bentuk cetak.

Dari penjabaran tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua media yang berbeda mengemas satu fenomena. Fakta dan realitas pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi. Peran manusia disini adalah membentuk dunia mereka sendiri, dan realitas itu kemudian mereka produksi. Pandangan konstruksionis adalah fakta berupa kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang terberi, tapi melainkan ada dalam benak kita yang melihat suatu fakta tersebut.

Membahas media, idealisme media itu sendiri terletak pada peran media sebagai pilar demokrasi. Hakikatnya, media adalah sebagai sarana yang berperan menyebarkan nilai kebebasan dan keseimbangan atau kesetaraan kepada masyarakat, sehingga setiap orang akan menyadari hak-haknya. Harapan masyarakat sangat tinggi kepada peran media, sehingga masyarakat berfikir dan berharap agar media bisa menjadi pelopor budaya yang berkualitas serta menyajikan informasi yang kredibel. Fikiran dan harapan itu menciptakan idealisme dalam masyarakat agar media menjadi sarana pendidikan kritis dengan pemikiran yang lebih dalam. Dengan begitu, media bisa meningkatkan mutu debat publik dan kematangan politik Negara. Saat ini, media massa menjadi penguasa, salah satunya adalah media cetak. Media cetak banyak melayangkan wacana-wacana yang mampu mengajak masyarakat mengikuti pola pikir dari media tersebut. Seakan-akan masyarakat diajak untuk mengiyakan apa-apa yang media tulis dan beritakan. Contohnya adalah wacana jawa pos terkait pencalonan aktivis politi perempuan Khofifah pada pilgub jatim 2018 ini, pemberitaannya sangat menarik untuk diikuti perkembangannya.

Menurut Wolf, Media massa memiliki potensi sebagai pemicu munculnya bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan sosial (*social relationships*) atau kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosok perempuan oleh media massa, baik melalui iklan atau beritanya, selalu diinterpretasikan secara negatif dan

sangat tipikal yaitu tempatnya perempuan hanya ada di dalam rumah, berperan tunggal sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, bergantung pada laki-laki, terbatas dalam menjalani profesi, tidak mampu membuat keputusan-keputusan penting, selalu melihat dirinya sendiri, sebagai sebuah objek seksual / simbol seks (*sexploitation, pornographizing*), objek peneguhan polakerja patriarki, objek fetish, sebagai objek pelecehan dan kekerasan, berada dalam posisi selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersikap pasif, serta sebagai alat pembujuk / negosiasi. Eksistensi perempuan tidak terwakili di media massa, dalam industri media hiburan ataupun dalam industri media berita pun masih diragukan secara Proporsional (Sunarto, 2009: 4). Melalui fungsi mediasi media sejatinya menunjukkan sesuatu pada khalayak bagaimana semua kekerasan tersebut diinformasikan dan dikonstruksi agar dipahami oleh publik secara lumrah sebagaimana mestinya.

Semua kegiatan serta proses Komunikasi Politik yang dilakukan oleh aktivis-aktivis partai politik secara umum memiliki tujuan untuk memberi penawaran atau menawarkan program-program partai untuk terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani ini dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki adab dalam membangun, menjalani, dan memberi makna pada kehidupan mereka. Istilah ini ditemukan oleh Anwar Ibrahim, yaitu seorang mantan perdana menteri Negara Malaysia. “Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur yang memiliki dasar prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari perorangan atau individu dan masyarakat adalah berupa sebuah pemikiran, pelaksanaan, kesenian, pemerintah yang berdasarkan UU dan bukan berdasarkan suatu keinginan ataupun nafsu dari perorangan atau individu” (Anwar Ibrahim). Keberadaan wanita atau perempuan pada sektor public dan politik masih mendapat respon pro kontra dari masyarakat, salah satunya di Indonesia. Hal tersebut berhubungan erat dengan budaya Patriarki yaitu yang menempatkan kedudukan pria atau laki-laki di atas kaum wanita atau perempuan, salah satunya termasuk hubungannya dengan keterlibatan pada sektor publik. Padahal sebetulnya partisipasi wanita atau perempuan dalam parlemen bisa

menjadi akar untuk memerjuangkan berbagai permasalahan kaumnya. Data yang dirilis oleh BPS bekerja sama dengan Unifem (2000) mengenai penyusunan statistik dan indikator berbasis gender menunjukkan angka rendahnya representasi perempuan dalam DPR (8.8%), MPR (9.1%), Anggota DPA (2.7%), hakim agung (13.7%), kepala desa/lurah (2.3%) dan kedudukan dalam jabatan struktural kepegawaian (15.2%), padahal rasio jumlah penduduk perempuan di atas rasio penduduk laki-laki (Rian Nugroho, 2008: xi).

Keputusan atau kebijakan yang memperjuangkan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan diharapkan dapat memajukan kepentingan kaum perempuan melalui para politisi perempuan tersebut. Pada kenyataannya memang wanita atau perempuan masih termarginalkan dan bermasalah di dalam berbagai bidang seperti pornografi, kesehatan reproduksi, trafficking, kekerasan, dan masih banyak lainnya. Paradigma yang berkembang di dalam masyarakat patriarki ini adalah tempat wanita atau perempuan adalah di sektor domestik atau hanya di dalam rumah, mengurus keperluan rumah. Wanita atau perempuan tidak bisa disejajarkan dengan pria atau laki-laki pada bidang-bidang tertentu. Jika kita berbicara mengenai peran sosial, kedudukan wanita atau perempuan untuk memasuki dunia sosial atau sektor publik terpinggirkan (termarginalkan) oleh kaum pria atau laki-laki.

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsive-gender. Salah satu strategi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa keseluruhan departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen pada pemerintah nasional, propinsi, maupun kabupaten atau kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. (dikutip dalam jurnal Alqanita Pohan : Gender Dalam Komunikasi Politik Aktivis Partai Islam).

Kesetaraan Gender jika sudah dimulai sejak tahun 1996 (pascapertemuan perempuan sedunia di Beijing tahun 1995), maka untuk mencapai keberhasilan membutuhkan waktu 15-20 tahun ke depan. Oleh sebab itu, konstruksi yang diubah adalah konstruksi sosial. Perubahan nilai-nilai sosial jika memakan waktu satu generasi, adalah sebuah keberhasilan besar, contohnya adalah seperti KB di Indonesia yang membutuhkan waktu 20 tahun (1970-1990). Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* menjelaskan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis serta bukan kodrat Tuhan. Gender adalah *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat, yaitu perbedaan yang bukan sebuah ketentuan / kodrat Tuhan, melainkan diciptakan oleh pemikiran manusia itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang terbilang cukup panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh Caplan (1987) bahwa *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekadar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial, maka dengan hal tersebut gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari kelas ke kelas, hingga dari waktu ke waktu, dan hal tersebut tidak mengubah jenis kelamin biologis. (Caplan dalam *The Cultural Construction of Sexuality* : 1987).

Mengingat keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik, setidaknya pemerintah telah memberikan peluang untuk wanita atau perempuan dalam memasuki dunia parlemen yaitu dengan Pasal 65 ayat (1) dalam UU Pemilu yang baru saja disahkan berbunyi:

“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30 persen.”

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian Analisis Bingkai (*Framing Analysis*) model Pan dan Kosicki pada level Teks (Sintaksis, Skrip, Tematik, Retoris) pendekatan Kualitatif.

Menurut Sudibyo (1999:176) dalam Sobur (2012:162), dalam ranah studi Komunikasi, analisis Framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Dalam perspektif Komunikasi, analisis Framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta yang menjadi pesan untuk pembaca atau masyarakat.

Surat kabar yang menjadi media kaji penulis dalam penelitian ini adalah SKH Jawa Pos dan SKH Kompas. Jawa Pos merupakan salah satu SKH dengan skala nasional sehingga berita yang hadir menjadi lebih variatif. Jawa Pos juga merupakan SKH dengan oplah yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 400.000 eksemplar per hari. Data dari *Nielsen Media Research* menetapkan Jawa Pos sebagai SKH dengan pembaca paling banyak, yakni mencapai 1.444, sedangkan Kompas (1.402), Pos Kota (1.118), Warta Kota (832), dan Top Skor (736). (dikutip dari www.jawapos.com). Terlihat dari tingkat besarnya minat baca masyarakat terhadap SKH Jawa Pos menjadikan SKH ini sebagai wadah informasi yang mencakup khalayak luas. Juga, Jawa Pos memilih memberitakan mengenai perkembangan pencalonan Khofifah terbilang cukup sering. Secara prinsip Jawa Pos sangat mendukung tindakan dari aktivis partai politik perempuan ini. Berbeda dengan SKH Jawa Pos, Kompas adalah surat kabar harian yang berskala Nasional yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 28 Juni tahun 1965 sebanyak empat halaman dengan oplah 6.800 eksemplar. Kompas bisa disebut sebagai surat kabar yang matang dalam hal manajemen organisasi dan redaksinya. Kompas juga hadir dalam lembaran daerah atau Kompas lokal untuk lebih mendekatkan diri dengan khalayak yang berada di daerah lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kompas saat ini juga dapat diakses melalui internet yang beralamatkan www.kompas.com yang menyediakan berita-berita sama dengan yang terdapat pada koran Kompas dalam bentuk cetak. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Kecurigaannya adalah Jawa Pos dan Kompas memiliki sudut pandang keberpihakan tertentu dari pemberitaan ini. Berdasarkan fenomena dan penjelasan

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politisi Perempuan di Media Cetak (Analisis Framing Pemberitaan Pencalonan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jawa Timur 2018 di Media Jawa Pos dan Kompas)”.

Peneliti sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi ingin melihat bagaimana media SKH Jawa Pos dan SKH Kompas membingkai pemberitaan seorang perempuan yang maju dalam pilkada 2018 hingga sedemikian rupa. Dalam hal ini adalah berita pencalonan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada 2018. Peneliti memilih dua media cetak Jawa Pos dan Kompas ini karena menurut hemat peneliti, dua media besar ini memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap fenomena yang terjadi. Dua media besar ini cenderung saling bertolak-belakang. Jawa Pos dan Kompas adalah dua media cetak yang mainstream, maksudnya adalah semua orang sudah mengenal dua media ini dan banyak yang berlangganan setiap harinya. Lebih lanjut, setiap berita nantinya akan dianalisis dengan model Analisis Bingkai (*Framing Analysis*) model Zongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam level Teks yang sesuai dengan data dari berita. Peneliti memilih model Zongdang Pan dan Gerald M.Kosicki ini karena model ini sangat detail bila digunakan untuk mengkaji permasalahan politik.

Peneliti memilih sosok Khofifah Indar Parawansa untuk diteliti dalam skripsi ini adalah karena semua orang sudah tahu bagaimana kiprah Khofifah Indar Parawansa dalam ranah politik. Juga sebelumnya Khofifah sempat gagal pada pilgub Jatim tahun 2008 yang saat itu berpasangan dengan Mudjiono. Khofifah-Mudjiono dikalahkan oleh paslon Soekarwo-Saifullah (karsa) atau pakde Karwo dan Gus Ipul. Tidak menyerah disitu saja, Khofifah kemudian mencalonkan diri lagi dalam pilgub Jatim tahun 2013, berpasangan dengan Herman Surjadi Sumawiredja, dan lagi lagi dikalahkan oleh Karsa jilid II. Dan Kali ini Khofifah Indar Parawansa akan berduet dengan Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam pilgub Jatim 2018.

1.2 Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dalam penelitian ini, maka masalah hanya akan penulis batasi pada pemberitaan pecalonan Khofifah di Pilgub Jatim 2018 di koran Jawa Pos dan Kompas pada bulan November 2017, Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, dan Mei 2018. Karena pada edisi tersebut Jawa Pos dan Kompas menampilkan berita Khofifah Indar Parawansa dan kegiatannya pada masa pra-kampanye dan masa kampanye Pilkada 2018.

Masa Pra-Kampanye yang dipilih peneliti disini yakni masa sejak Penyerahan dokumen syarat dukungan cagub-cawagub untuk KPU Provinsi sesuai dengan agenda pilkada di situs KPU. Sedangkan masa kampanye yang dimaksud oleh peneliti disini adalah masa dimana paslon mulai mempromosikan diri mereka ke masyarakat. Baik melalui media sosial ataupun secara langsung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas, maka pada penelitian ini peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Media Jawa Pos dan Kompas membingkai pemberitaan Pencalonan Khofifah pada Pilgub Jatim 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan di atas, maka pada penelitian ini peneliti dapat menemukan bagaimana Media Jawa Pos dan Kompas membingkai wacana pemberitaan Pencalonan Khofifah pada Pilgub Jatim 2018 dengan model Analisis Framing Zhongdan Pan dan Gerald M.Kosicki pada Level Teks yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai karya Ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wacana keilmuan komunikasi dalam kajian teks media dengan menggunakan *Framing Analysis* model Zhongdan Pan dan Gerald M.Kosicki pada Level Teks yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris.

Penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi bahan informasi dan data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, dalam meningkatkan pengetahuan yang terkait dengan Analisis Teks Media Cetak yang menggunakan paradigma penelitian media Analisis Bingkai (*Framing Analysis*).

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberi pengetahuan khususnya bagi para praktisi media, mahasiswa Ilmu Komunikasi ataupun Jurnalistik, dan umumnya kepada seluruh masyarakat peminat bidang Analisis Teks Media Cetak, Analisis Bingkai (*Framing Analysis*) model Zongdang Pan dan Gerald M.Kosicki, wartawan dalam kerja jurnalistiknya tidak lepas dari Ideologi media, juga dapat menambah pengetahuan tentang fenomena-fenomena sosial yang berkembang saat ini khususnya tentang isu-isu gender kaitannya dengan politik perempuan dalam media, khususnya media cetak.